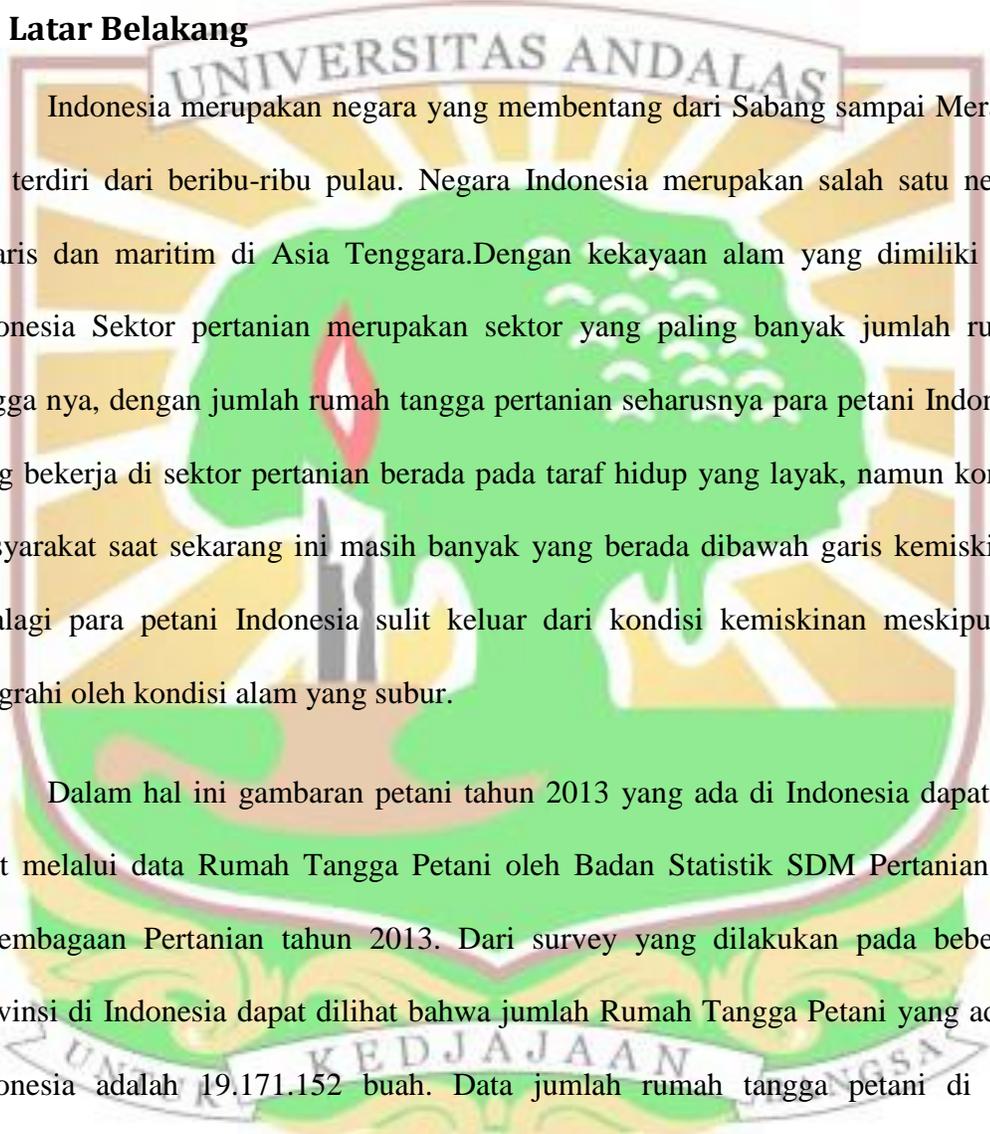


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**



Indonesia merupakan negara yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari beribu-ribu pulau. Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris dan maritim di Asia Tenggara. Dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak jumlah rumah tangganya, dengan jumlah rumah tangga pertanian seharusnya para petani Indonesia yang bekerja di sektor pertanian berada pada taraf hidup yang layak, namun kondisi masyarakat saat sekarang ini masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan. Apalagi para petani Indonesia sulit keluar dari kondisi kemiskinan meskipun di anugrahi oleh kondisi alam yang subur.

Dalam hal ini gambaran petani tahun 2013 yang ada di Indonesia dapat kita lihat melalui data Rumah Tangga Petani oleh Badan Statistik SDM Pertanian dan Kelembagaan Pertanian tahun 2013. Dari survey yang dilakukan pada beberapa Provinsi di Indonesia dapat dilihat bahwa jumlah Rumah Tangga Petani yang ada di Indonesia adalah 19.171.152 buah. Data jumlah rumah tangga petani di atas, berdasarkan sub-sektor pertanian tersebut meliputi: tanaman pangan, hortikultura perkebunan, dan peternakan. Data diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 1.1**  
**Persentase Jumlah Rumah Tangga Petani 2013**

No	Sub-sektor	Jumlah	Persentase
1	Tanaman Pangan	10.746.046	56.05%
2	Hortikultura	1.131.317	5.90%
3	Perkebunan	6.095.339	31.80%
4	Peternakan	1.198.450	6.25%
	Indonesia	19.171.152	100%

Sumber: Statistik Pertanian 2013

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Sedangkan petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.<sup>1</sup> Petani tanaman pangan adalah petani yang bergerak di bidang tanaman pangan seperti petani padi. Petani padi merupakan salah satu pekerjaan vital karena makanan pokok rakyat Indonesia bergantung pada mereka. Kesejahteraan para petani akan bergantung kepada tingkat produktivitas hasil pertanian. Begitu juga di Sumatera Barat, dimana sumber mata pencarian masyarakat Sumatera Barat pada umumnya berasal dari sektor pertanian, terutama petani padi.

<sup>1</sup> Undang-Undang no 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

Berdasarkan hasil Statistik Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Pertanian, jumlah rumah tangga pertanian yang ada di Sumatera Barat adalah 427.651 (empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu)<sup>2</sup>. Masalah-masalah yang biasa dihadapi petani adalah kesulitan petani mendapatkan bibit unggul, petani kesulitan mendapatkan peptisida, petani kesulitan memperoleh pupuk. Masalah yang mendasar yang dihadapi petani pedesaan adalah kurangnya akses petani terhadap permodalan, informasi, dan teknologi serta pemasaran.

Pada uraian diatas yang menjadi inti permasalahan adalah kurangnya sosialisasi dan penyuluhan, pengembangan usaha pertanian, dan kurangnya pembelajaran atau pelatihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pertanian terhadap petani. Kelembagaan pertanian adalah lembaga yang di tumbuhkan dan dikembangkan dari petani dan untuk petani guna untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Lembaga-lembaga pertanian tersebut yaitu Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas kesamaan kepentingan: atas kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya: kesamaan komoditas: dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Statistik Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Pertanian tahun 2013

<sup>3</sup>Undang-Undang no 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Untuk mengatasi permasalahan yang sering di alami oleh para petani maka Pemerintah mengeluarkan Kebijakan dan Undang-Undang sebagai berikut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pembinaan Kelembagaan Petani, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang ini menuliskan bahwa untuk menunjang kesejahteraan petani dilakukan upaya pembinaan yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembinaan dilakukan dengan pembelajaran dan pengembangan usaha pertanian menjadi tanggung jawab bagi pemerintah maupun masyarakat dan disertai peran dan ikut serta tokoh masyarakat terhadap pembinaan dan pengembangan usaha pertanian.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengekspresikan makna yang terkandung pada Kebijakan dan Undang-Undang tersebut diatas, melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Barat menetapkan Visi dan Misi yang secara sistematis telah dalam Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan tahun 2010-2015. Visi “Terwujudnya Rumah Tangga Petani Yang Sejahtera”, maka Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah “Meningkatkan Pemberdayaan Petani, Meningkatkan Kompetensi Aparatur, Meningkatkan Efisiensi, Mutu Produksi dan Daya Saing, Mengembangkan Pertanian Organik dan Leisa, Mengoptimalkan

## Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dan Sarana Prasarana Pertanian, Meningkatkan Kelembagaan Permodalan dan Peluang Pasar”

Dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan petani maka dibentuk lah sebuah lembaga pertanian yaitu gabungan kelompok tani atau yang lebih dikenal dengan Gapoktan. Gapoktan ini beranggotakan dari gabungan kelompok-kelompok tani yang ada di pedesaan, yang mana lembaga ini di bentuk atas azas-azas kesamaan tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah bagi Pemerintah melalui Dinas Pertanian untuk sosialisasi, pembelajaran, dan pengembangan usaha pertanian pedesaan. Tugas pokok dan fungsi dari Gapoktan adalah sebagai wadah untuk berkumpulnya kelompok tani dan para petani yang kelompok taninya terdaftar sebagai anggota Gapoktan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas, dan mempunyai asas dan tujuan yang sama.

Ada pun tujuan dari pembentukan Gapoktan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pendidikan pelatihan dan study banding sesuai kemampuan keuangan gapoktan, meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara keseluruhan tanpa kecuali yang terlibat dalam kepengurusan mau pun hanya sebagai anggota, secara materiil maupun non material sesuai dengan kontribusi/andil/masukan yang diberikan kepada pengembangan organisasi gapoktan, menyelenggarakan dan mengembangkan usaha dibidang pertanian dan jasa yang berbasis pada bidang pertanian di wilayah kelurahan dan

pedesaan, dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak, harus diketahui dan disepakati oleh rapat anggota dengan perencanaan dan analisa yang jelas dan harus berpedoman anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Sebagai gambaran tentang jumlah gapoktan yang ada di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 adalah sebanyak 601 (enam ratus satu) Gapoktan, yang mempunyai anggota sebanyak 80.742 (delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua) Rumah Tangga Petani. Untuk gambaran jumlah Gapoktan tahun 2013 dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Gapoktan di Sumatera Barat 2013-2014**

No	Kabupaten dan kota	Jumlah	
		2013	2014
1	Kab. Pesisir Selatan	36	52
2	Kab. Solok	5	42
3	Kab. Sijunjung	62	70
4	Kab. Tanah Datar	94	97
5	Kab. Padang Pariaman	74	82
6	Kab. Agam	45	50
7	Kab. Lima puluh kota	18	32
8	Kab. Pasaman	19	29
9	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-
10	Kab. Dharmasraya	91	95
11	Kab. Solok Selatan	20	25
12	Kab. Pasaman barat	19	25

13	Kota Padang	53	55
14	Kota Solok	11	15
15	Kota Sawahlunto	5	10
16	Kota Padang panjang	3	10
17	Kota Bukit tinggi	-	-
18	Kota Payakumbuh	40	75
19	Kota Pariaman	6	69
Sumatera Barat		601	833

Sumber: Olahan Peneliti 2014 dan Pusat Data dan Informasi Pertanian

Berdasarkan data diatas terjadi peningkatan jumlah gapoktan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini di sebabkan dengan di galakannya program-program tentang pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dari data diatas kota yang peningkatan jumlah gapoktan adalah Kota Pariaman.

Kota Pariaman merupakan kota di Provinsi Sumatera Barat yang peningkatan jumlah gapoktannya meningkat signifikan dari 6 gapoktan pada tahun 2013 kini menjadi menjadi 69 buah tahun 2014. Gapoktan tersebut terdapat pada 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kota Pariaman. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pariaman tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Selatan. Karena alasan-alasan dan fenomena-fenomena tersebut memilih Kota Pariaman sebagai lokasi penelitian. Untuk dapat melihat berapa banyak jumlah gapoktan yang ada pada tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kota Pariaman, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Gapoktan di Kota Pariaman pada tiap-tiap Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Pariaman Tengah	20
2	Pariaman Timur	16
3	Pariaman Utara	17
4	Pariaman Selatan	16
Kota Pariaman		69

Sumber: olahan peneliti dan Dinas Pertanian Kota Pariaman 2014

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa tiap-tiap Kecamatan yang terdapat di Kota Pariaman mempunyai gapoktan, Kecamatan Pariaman Tengah mempunyai 20 buah, Kecamatan Pariaman Timur 16 buah, Kecamatan Pariaman Utara 17 buah, dan Kecamatan Pariaman Selatan 16. Dari keempat Kecamatan yang ada di Kota Pariaman, Pariaman Selatan merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah lahan pertanian yang paling luas dan jumlah petani paling banyak. Hal tersebut merupakan alasan peneliti memilih kecamatan pariaman selatan sebagai lokasi penelitian. Untuk menguatkan alasan peneliti berikut peneliti lampirkan data-data luas lahan pertanian di Kota Pariaman:

**Tabel 1.4**  
**Luas Lahan Pertanian Yang dikuasai Rumah Tangga Pertanian Dari Penggunaan Lahan (m<sup>3</sup>) di Kota Pariaman**

No	Kecamatan	Lahan Pertanian		Bukan lahan pertanian	Jumlah
		Sawah	Bukan sawah		
1	Pariaman selatan	5.955.976	2.558.095	234.036	8.746.099

2	Pariaman Tengah	969.849	673.795	180.709	1.824.353
3	Pariaman Timur	2.690.400	2.228.450	193.587	5.112.437
4	Pariaman Utara	2.896.482	2.233.879	190.339	5.320.700
Kota Pariaman		12.512.707	7.694.219	798.663	21.005.589

Sumber: Statistik Pertanian Kota Pariaman 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan pariaman selatan mempunyai luas daerah pertanian yang paling besar dari kecamatan-kecamatan yang lainnya. Hal ini juga juga didukung dengan jumlah rumah tangga petani yang paling banyak di Kota Pariaman. Dalam hal ini peneliti juga mempunyai data tentang jumlah rumah tangga petani di Kota Pariaman menurut Kecamatan berdasarkan jenis kelamin, berikut data tersebut:

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Petani di Kota Pariaman**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pariaman Selatan	1.270	325	1595
2	Pariaman Tengah	539	106	645
3	Pariaman Timur	980	232	1.212
4	Pariaman Utara	946	141	1.089
Pariaman		3.735	804	4.539

Sumber: Olahan peneliti dan BPS Kota Pariaman 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Pariaman Selatan merupakan Kecamatan yang mempunyai petani yang paling banyak di Kota Pariaman yaitu 1.595 (seribu lima ratus sembilan puluh lima) orang, kedua Kecamatan Pariaman Timur sebanyak 1.212 (seribu dua ratus dua belas) orang, selanjutnya Kecamatan Pariaman Utara sebanyak 1.087 (seribu delapan puluh tujuh) orang, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Pariaman Tengah 645 (enam ratus empat puluh lima) orang. Dari data tersebut yang menjadikan alasan pemilihan lokasi penelitian Kecamatan Pariaman Selatan. Sebab dikarenakan Kecamatan Pariaman Selatan adalah Kecamatan yang paling luas lahan pertanian dan yang paling banyak jumlah petani terdapat di Kota Pariaman.

Desa Marabau adalah salah satu desa di Kecamatan Pariaman Selatan, Pada Desa ini terdapat sebuah Gapoktan yaitu Gapoktan lubuk anau. Gapoktan ini adalah satu-satunya gapoktan Kecamatan Pariaman Selatan yang mempunyai komoditi unggulanya yaitu padi sawah. Hal ini menjadi alasan peneliti memilih Gapoktan Lubuk Anau sebagai Unit analisis pada penelitian ini.

Gapoktan Lubuk Anau adalah satu-satunya gapoktan yang ada di desa Marabau, gapoktan ini terdiri dari 4 poktan (kelompok tani) ketiga kelompok tani tersebut adalah Cambuang CRB, Bungo Saiyo, KWT Sayang Ibu, KWT Camar, jumlah anggota dari gapoktan ini adalah 110 orang. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab terhadap gapoktan baik dari segi pengembangan dan pengawasannya adalah BPP (balai penyuluhan Pertanian). BPP ini juga sebagai ujung tombak terhadap setiap

program yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk petani. Balai penyuluhan pertanian ini terdapat pada setiap Kecamatan yang terdapat di Kota Pariaman. Tupoksi dari BPP adalah memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitas. Sedangkan Visi Misi BPP itu sendiri itu adalah:

1. Terwujudnya pertanian yang berorientasi ketahanan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memfasilitasi dan mendorong berkembangnya usaha-usaha agribisnis dari berbagai tingkatan skala usaha dan mendorong perkembangannya, kerjasama kemitraan bisnis antar usaha dalam konsep saling menguntungkan.
3. Memfasilitasi dan mendorong pembangunan inprastuktur pertanian/agribisnis yang diperlukan agar memberikan iklim yang kondusif bagi investasi di bidang agribisnis.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bail aparatur pemerintahan maupun pelaku agribisnis.

BPP seyogyanya bekerja sesuai dengan Tupoksi dan Prosedur yang sudah ada tertuang dalam undang-undang no 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian bab II pasal 3 ayat 2 yaitu memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kodusif,

penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi.<sup>4</sup>BPP Kecamatan Pariaman Selatan adalah UPT (unit pelaksanaan teknis) yang bertanggung jawab terhadap segala bentuk proses pertanian yang ada di Kecamatan Pariaman Selatan. Dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh BPP adalah dengan cara tim, yang mana tim-tim yang bentuk terdiri dari seorang penyuluh yang bertanggung jawab terhadap tiap-tiap desa yang terdapat di Kecamatan Pariaman Selatan. Jadi pada UPT-BPP Kecamatan Pariaman Selatan terdapat 16 (enam belas) orang penyuluh, dan masing-masing penyuluh tersebut didampingi oleh 2 (dua) orang tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas dan kerja.

Dalam hal ini kenyataan yang di lihat peneliti di lapangan bertolak belakang dengan yang ada pada tupoksi BPP yang seharusnya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya program-program yang dapat menujung terjadinya proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BPP terhadap petani yang ada di Gapoktan Lubuk Anau. Program-program tersebut seperti program pengembangan dan pembelajaran dalam penggunaan lahan, program mengenai motivasi.

Hal ini juga di ungkapkan oleh ketua Gapoktan bapak Abdul Ajis pada hasil wawancara, menjelaskan sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Undang-undang no 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian pasal 3 ayat 2

<sup>5</sup>Wawancara dengan bapak Abdul Ajis selaku ketua Gapoktan pada tanggal 10 November 2014 jam 10.10.

*“...Bpp Kecamatan Pariaman Selatan belum ada mengeluarkan program-program pemberdayaan seperti pelatihan terhadap ketua Gapoktan dan anggota gapoktan, bagaimana hasil pertanian yang kami peroleh bisa meningkat kalau belum adanya program pemberdayaan yang dapat menunjang hasil produksi pertanian”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpilkam bahwa BPP kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman belum dapat melaksanakan tugas nya sebagaimana yang sudah diatur dalam Tupoksi dan Prosedur.

PemberdayaansangatpentingdilakukanpadaDesaMarabauKecamatanPariaman KotaPariaman, halinikarenamasihtingginyatingkatkemiskinandanrendahnyatingkatpendapatanmasyarakat di desatersebut.Dari kenyataan yang peneliti lihat dilapangan bahwa BPP Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman belum dapat menjalankan tugas sebagai penyuluh yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan usaha pertanian di Desa Marabau. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut yang menyatakan bahwa belum tercapainya target produktivitas hasil pertanian di desa Marabau.

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Produksi Hasil Pertanian Desa Marabau**

No	Tahun	Produksi	Target
1.	2013	10 Ton	15 Ton
2.	2014	13 Ton	15 Ton

Sumber: Dinas pertanian dan olahan peneliti 2015

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa target produksi hasil pertanian di Desa Marabau belum bisa memenuhi target. Pada tahun 2013 Desa Marabau hanya mampu memproduksi 66,6 % hasil pertanian. Dari 15 ton yang di targetkan oleh dinas Pertanian Kota Pariaman, Desa Marabau hanya mampu memproduksi 10 ton hasil pertanian. Sedangkan pada tahun 2014 desa Marabau mengalami peningkatan dari hasil produksi pertanian sebesar 20,1%.

Untuk dapat memenuhi target dari yang sudah ditentukan oleh Dinas Pertanian Kota Pariaman, diperlukan pemberdayaan, pengembangan dan pelatihan tentang usaha pertanian/agribisnis yang lebih baik lagi agar target dan kesejahteraan para petani di desa Marabau dapat tercapai. Seharusnya penyuluh melakukan penyuluhan pemberdayaan sebanyak 2(dua) kali dalam 1 (satu) bulan. Tapi dalam pelaksanaannya penyuluh hanya datang berkunjung 1 (satu) kali dalam sebulan. Hal itu hanya untuk mengecek keadaan Gapoktan dan keadaan keuangan Gapoktan. Hal ini terdapat pada daftar kunjungan yang terdapat pada Gapoktan Lubuk Anau:

**Tabel 1.7**  
**Daftar Kunjungan pada Gapoktan Lubuk Anau**

No	Nama	Tanggal	Dinas	Keperluan	Keterangan
1	Rahmita S.T	14-01-2014	BPP		Penyuluh
2	Marlina Seppa S.P	12-02-2014	Kepala BPP		Sda

3	Marlina Seppa S.P.	17-03-2014	Kepala BPP		Sda
4	Rahmita S.T.	12-05-2014	BPP		Sda
5	Rahmita S.T.	23-06-2014	BPP		Sda
6	Marlina Seppa S.P.	11-08-2014	Kepala BPP		Sda
7	Rahmita S.T.	22-09-2014	BPP		Sda
8	Marlina Seppa S.P.	13-10-2014	Kepala BPP		Sda
9	Rahmita S.T.	10-11-2014	BPP		Sda
10	Marlina Seppa S.P.	29-12-2014	Kepala BPP		Sda

Sumber: Daftar tamu pada gapoktan Lubuk Anau tahun 2014 dan Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa BPP tidak selalu melakukan kunjungan kepada Gapoktan Lubuk Anau pada tiap bulannya. Hal itu terlihat dengan tidak adanya kunjungan oleh BPP pada bulan April dan Juli.

Fenomena lainnya yang peneliti temukan dilapangan bahwasanya program lainnya yang belum adanya program pemasaran yang dilakukan oleh pihak BPP terhadap hasil produksi pertanian dari petani desa marabau sehingga petani kurang bisa untuk mendapat keuntungan yang sepadan dengan hasil pertanian yang mereka produksi, sejalan dengan itu dari pihak petani kurangnya akses terhadap kebutuhan bahan dan alat pertanian seperti kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi dan bibit unggul, mesin bajak dan mesin tompi (mesin pemisah gabah dengan batang padi).

Jadi dapat dikatakan bahwa kerja dari penyuluh yang ada terdapat pada UPT-BPP Kecamatan Pariaman Selatan belum berjalan dengan baik dan sesuai dengan

tupoksi dan Undang-undang yang berlaku. Hendaknya penyuluh harus mempunyai strategi- strategi yang bagus dalam hal pemberdayaan dan pengembangan petani untuk meningkatkan hasil produktivitas dan kesejahteraan. Menurut Ismawan Priyono adanya 5 (lima) strategi dalam pemberdayaan yaitu:

1. Pengembangan sumber daya manusia:
2. Pengembangan kelembagaan kelompok:
3. Pemupukan modal masyarakat(swasta):
4. Pengembangan usaha produktif:
5. Penyediaan informasi tepat guna:

Terkait dengan strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Ismawan Priyono yang pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia, terjadi permasalahan pada Gapoktan Lubuk Anau. Dari hasil wawancara dengan bapak Abdul Ajis selaku ketua Gapoktan Lubuk Anau, menjelaskan sebagai berikut:<sup>6</sup>

“...pelatihan dan pembelajaran terhadap petani pada saat ini masih kurang dilaksanakan oleh penyuluh, penyuluh hanya meminta data berapa jumlah petani dan daftar kebutuhan yang diperlukan petani yang tergabung dalam gapoktan ini”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pembelajaran bagi petani pada saat ini masih kurang dilaksanakan oleh penyuluh, yang hanya

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan bapak Abdul Ajis selaku ketua gapoktan pada 10 November 2014 jam 10.10

penyuluh meminta beberapa data jumlah petani dan daftar kebutuhan petani yang tergabung dalam gapoktan ini.

Hal ini yang menyebabkan petani-petani pada Gapoktan Lubuk Anau ini kurang berkembang dalam pola pikir sehingga berpengaruh kepada produktivitas pertaniannya. Fenomena tersebut sangat mempengaruhi dalam pengembangan usaha pertanian yang menjadi profesi mereka sebagai petani. Seiring dengan kurangnya pengembangan sumber daya manusia yang menjadi strategi pemberdayaan yang pertama yang dikemukakan oleh Ismawan Priyono menyebabkan strategi pemberdayaan yang kedua juga tidak dapat di jalankan. Hal ini di sebabkan oleh penyuluhan dan pengembangan yang dilakukan penyuluh jarang di lakukan pada Gapoktan, padahal Gapoktan ini adalah gapoktan satu-satunya di Kecamatan Pariaman Selatan yang komoditi unggulannya padi sawah. Dengan masih kurangnya program pengembangan sumberdaya manusia menyebabkan program pengembangan kelembagaan kelompok tidak dapat dijalankan, dikarenakan yang menjalankan kelembagaan kelompok adalah individu. Jika individu yang ada di dalam kelompok tidak berkembang maka kelembagaan kelompoknya tidak dapat dikembangkan dengan maksimal.

Mengenai strategi pemberdayaan yang ketiga Pemupukan Modal Masyarakat (swasta), belum adanya pihak swasta yang mau menanam modal nya untuk sektor pertanian, hal ini di karenakan oleh bantuan pemerintah untuk petani banyak tapi belum banyak terealisasi dengan baik. Dari segi Pemupukan Modal Masyarakat, Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan sebuah program yaitu pemberian dana

pinjaman untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), pada program tersebut Gapoktan harus membentuk sebuah lembaga keuangan masyarakat agribisnis (LKM-A). Lembaga ini yang mengatur keuangan pada Gapoktan, dalam yang pelaksanaannya pemerintah memberikan bantuan modal sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Gapoktan, dana tersebut diperuntukan sebagai modal dalam usaha agribisnisnya. Gapoktan mengelola keuangan melalui lembaga keuangan masyarakat agribisnis (LKM-A) yang memberikan pinjaman lunak berkala yang memiliki bunga rendah yaitu 0,05%, dengan rentan waktu pengembalian pinjaman selama 12 bulan atau 1 Tahun. Pinjaman tersebut dibatasi nominal yang bisa di pinjam yaitu sebanyak 2.000.000,00 masyarakat yang dapat meminjam dana tersebut adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Petani tersebut tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar sebagai anggota Gapoktan. Mengenai dalam dana pinjaman yang sudah diberikan kepada petani, dalam kenyataannya tidak tepat sasaran dalam hal penggunaannya, karena dana tersebut digunakan oleh para petani hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Fakta dilapangan yang di dapatkan oleh peneliti adalah banyak para petani menggunakan dana tersebut tidak untuk usaha pertaniannya melainkan untuk kebutuhan lainnya. Hal ini sama dengan apa yang dituturkan oleh Ibuk Rahmita S.Pt, berikut hasil wawancara peneliti dengan seorang penyuluh di Gapoktan Lubuk Anau<sup>7</sup>:

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ibuk Rahmita S.Pt yaitu penyuluh pertanian untuk Gapoktan Desa Marabau pada tanggal 11 November 2014.

“...Dana PUAP yang diberikan kepada para masyarakat petani lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk membeli lauk pauk dan untuk pembayaran uang sekolah maupun uang semester kuliah anak mereka, jadi dana tersebut tidak sampai kepada sasaran yang seharusnya yaitu untuk modal usaha pertanian seperti pembelian benih dan modal awal untuk menggarap lahan”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dana pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) yang diberikan kepada petani lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk membeli lauk pauk dan pembayaran uang sekolah, jadi dana tersebut tidak sampai sasaran yang seharusnya untuk modal usaha pertanian.

Hasil wawancara diatas juga didukung oleh pernyataan warga yang menyatakan bahwa dana tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Dalam hal ini memang sangat berpengaruh terhadap pengembangan sumberdaya manusia, jika pengembangan sumberdaya manusia yang tergabung dalam kelembagaan kelompok sudah dilaksanakan dan membuahkan hasil yang maksimal sudah pasti masyarakat yang berprofesi sebagai petani bisa menggunakan dana tersebut dengan maksimal untuk pengembangan usaha pertaniannya.

Strategi pemberdayaan yang ke empat adalah pengembangan usaha produktif, dalam hal ini kembali kepada masalah yang pertama yaitu kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap petani, hal ini menyebabkan

usaha pertanian yang menjadi usaha produktif pada gapoktan Lubuk Anau kurang berkembang. Pada Gapoktan Lubuk Anau tersebut yang menjadi usaha produktifnya pada sektor pertanian adalah padi sawah, dalam hal ini Gapoktan Lubuk Anau hanya mempunyai satu komoditi saja yaitu padi sawah. Berbicara tentang pengembangan usaha produktif tidak lepas dari pengembangan sumberdaya manusia. Karena, jika sumberdaya manusia yang terlibat dalam sebuah kelembagaan kelompok sudah baik dan mempunyai cukup modal, sudah pasti berdampak positif terhadap pengembangan usaha produktif.

Strategi pemberdayaan yang terakhir adalah penyediaan informasi tepat guna sangat buruk, hal ini di buktikan dengan belum ada web atau halaman internet yang pada Dinas Pertanian Kota Pariaman untuk dapat berguna sebagai sarana informasi-informasi dan pemberitahuan mengenai pertanian di Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan oleh tidak adanya saran untuk menyampaikan informasi kepada petani seperti mading dan papan pengumuman.

Berdasarkan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ ***Pemberdayaan Petani Oleh BPP Melalui Gapoktan di Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman***”

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, yang sangat penting dalam suatu penelitian adalah adanya masalah yang akan diteliti. Agar dapat dilaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya maka peneliti harus merumuskan masalah dengan jelas dari mana harus dimulai, kemana harus pergi dan dengan apa<sup>8</sup>. Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemberdayaan Petani Oleh BPP melalui Gapoktan Lubuk Anau di Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan kelompok tani di Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan Gapoktan di Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan di lingkungan akademisi. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam kajian Pemberdayaan

---

<sup>8</sup>Arikunto,Suharsimi. 1996 *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan praktek*. Edisi revisi III. Cetakan kesepuluh. Jakarta:Rineka Cipta. Hal 19

Kelompok Tani melalui Gapoktan di desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dan sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian yang akan datang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, acuan, dan sumbangan pikiran terhadap Pemberdayaan Kelompok Tani melalui Gapoktan di desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini adalah terdiri dari enam bagian yang terdiri dari :

1. BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini peneliti mendeskripsikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dilaksanakan

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada BAB ini peneliti menguraikan kerangka teori yang merupakan pedoman dari peneliti terdahulu yang relevan, landasan teori yang digunakan, definisi konsep, definisi operasional dan skema pemikiran peneliti.

3. BAB III Metode penelitian

BAB ini berisikan tentang metode penelitian yang peneliti pakai dalam meakukan penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, desain

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan informan, peranan peneliti, unit analisis, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

#### 4. BAB IV Deskripsi Lokasi Penelitian

BAB ini memberikan gambaran mengenai interaksi tempat akan dilakukannya penelitian tersebut mulai dari gambaran secara umum, visi misi organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi hingga struktur organisasi.

#### 5. BAB V Temuan dan Analisis Data

Berisikan tentang data yang menguraikan tentang proses analisis dan pembahasan yang merupakan hasil dari observasi peneliti di lapangan

#### 6. BAB VI Penutup

Berisikan VI Kesimpulan dan saran yang dapat memberikan simpulan dengan memaparkan hasil penelitian secara lebih singkat dan memberikan saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak terkait

